

Penyakit Kronis Bernama Plagiarisme



WUJUD plagiarisme bermacam-macam. Mulai dari mengopi atau menyalin karya orang lain, baik itu kata demi kata, atau membuat perubahan-perubahan kecil dengan niat untuk menyajikannya sebagai karya kita sendiri.* DUDI SUGANDI/"PR"

DUA berita HU Pikiran Rakyat ("PR") di akhir pekan lalu sungguh memprihatinkan. Sabtu, 24 April 2010, "PR" mengangkat berita ihwal pencabutan gelar doktor seorang

tersangka plagiarisme di universitas terkemuka Indonesia. ITB menyatakan, disertasi dan ijazah Mochamad Zuliansyah tidak berlaku lagi menyusul plagiarisme yang dilakukan secara sengaja terhadap disertasi Dr. Siyka Zlatanova dari Graz University, Austria. Peristiwa ini mencemarkan reputasi ITB sebagai institusi ilmiah yang punya reputasi tinggi sekaligus menyeret para pembimbing Zuliansyah ke dalam pusaran persoalan etik.

Pada halaman lain, di rubrik Kota Bandung, "PR" memuat berita tentang penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2009 yang disampaikan oleh Pemkot Bandung. Pansus LKPJ menemukan indikasi penjiplakan laporan tersebut dari laporan sejenis yang dibuat untuk pertanggungjawaban tahun sebelumnya. Salah satu contohnya, dikutip oleh "PR", permasalahan dan solusi bidang pendidikan pada LKPJ 2009 sama persis dengan 2008. Ini menimbulkan pertanyaan, laporan dengan kualitas macam apa yang hanya bisa meng-copy paste laporan tahun sebelumnya? Sungguh menyedihkan.

Plagiarisme, atau penjiplakan, pada dasarnya merupakan inti dari kedua pemberitaan tersebut. Plagiarisme, jika dilakukan oleh akademisi maupun eksekutif pemerintahan, dosanya sama berat. Yang jelas, peristiwa ini memperlihatkan betapa plagiarisme telah menjadi penyakit yang sangat kronis dalam masyarakat kita!

Plagiarisme akademis

Kasus Mochamad Zuliansyah bukanlah satu-satunya plagiarisme akademis yang terjadi di tengah-tengah kita. Beberapa pekan lalu, barangkali Anda masih ingat, kasus serupa juga terjadi di Universitas Parahyangan (Unpar) Februari lalu. Sedikit berbeda, kasus Prof. Anak Agung Banyu Perwita terjadi karena sasaran plagiasinya bukanlah disertasi, melainkan artikel ilmiah populer yang dimuat di the Jakarta Post. Walau "kadar" plagiarismenya tak seberat plagiat disertasi, kejadian ini tetap saja mencoreng institusi yang bersangkutan sehingga Unpar merasa perlu membentuk panitia khusus untuk menginvestigasi kasus tersebut.

Tahun 1997, dunia akademis Indonesia juga pernah dihebohkan oleh kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seorang cendekiawan ternama. Tidak tanggung-tanggung, Amir Santoso, seorang doktor sekaligus pengamat politik asal UI diduga menjiplak berbagai karya tulis, baik yang ditulis oleh kolega maupun mahasiswanya sendiri. Tak ayal, kasus itu mengakibatkan kredibilitas Amir Santoso dipertanyakan di mana-mana.

Plagiarisme, menurut Peter Redman dalam *Good Essay Writing* (2004), "... means using someone else's work and passing it off as your own". Plagiarisme berarti menggunakan karya orang lain, dan menyatakan atau mengaku-aku karya tersebut sebagai milik sendiri. Wujud plagiarisme bermacam-macam. Mulai dari mengopi atau menyalin karya orang lain, kata demi kata, atau membuat perubahan-perubahan kecil dengan niat untuk menyajikannya sebagai karya kita sendiri.

Kasus plagiarisme yang terjadi di kalangan akademis merupakan masalah akut. Tentu saja ini memprihatinkan mengingat kalangan akademis semestinya adalah pihak yang paling serius dalam mengaplikasikan etika penulisan ilmiah. Banyaknya plagiarisme menunjukkan lemahnya kontrol, penegakan, dan barangkali, pendidikan seputar etika akademis. Pula, di sisi lain, memperlihatkan lemahnya kreativitas berpikir (sehingga perlu menjiplak pemikiran orang lain), merajalelanya keserakahan (demi mengejar nama besar, kredit point, atau gelar), dan, tentu saja, ketidakjujuran plus kemalasan yang memalukan. Malas dalam berpikir, berusaha, berlogika, menganalisis, atau mencari sumber-sumber yang kredibel. Maunya serba tersedia, tanpa repot-repot berpikir!

Plagiarisme nonakademis

Plagiarisme bukan saja penyakit kronis di lingkungan akademis. Di kalangan eksekutif pun banyak laporan pertanggungjawaban atau proposal kegiatan yang sifatnya copy paste—hanya menyalin saja laporan atau tulisan sejenis dari masa-masa sebelumnya. Kasus LKPJ 2009 Pemkot Bandung tadi misalnya. Modusnya, mengopi laporan tahun lalu. Seperti dikutip dari laporan "PR", hampir semua redaksionalnya tidak ada perubahan. Urutannya pun tidak banyak berubah ("PR", Sabtu, 24 April 2010).

Media juga beberapa kali tersandung dengan urusan plagiarisme. Artikel beberapa penulis opini diprotes oleh pembaca lain yang menemukan tulisan serupa di media lain. Kasusnya bermacam-macam. Bisa saja apa yang diduga plagiarisme adalah artikel yang ditulis oleh penulis yang sama, topiknya sama, isi, dan judulnya sama persis, atau ditulis oleh penulis yang sama dengan judul yang berbeda, tetapi substansi isi dan redaksional kata-katanya sama persis. Di sini, korbannya adalah media yang kecolongan. Akan tetapi tidak jarang, ketika ditelusuri, hal tersebut disebabkan penulis artikel tidak tahu bagaimana posisi artikelnya—apakah akan dimuat, atau ditolak. Ketika dalam batas waktu tertentu artikel kirimannya tidak kunjung dimuat, maka sang penulis kemudian melemparkannya ke media lain. Ternyata, pada waktu yang hampir bersamaan, tulisan-tulisan tersebut dimuat. Dalam hal ini, persoalannya lebih pada saluran komunikasi antara penulis dengan media yang macet. Akan tetapi, tidak jarang pula kasus plagiarisme terjadi karena penulis menyontek tulisan orang lain yang kemudian diklaim sebagai tulisannya sendiri. Inilah plagiarisme murni. Mencuri gagasan orang lain kemudian tanpa malu-malu mengakui sebagai tulisannya sendiri.

Di luar media, plagiarisme juga melanda dunia industri. Lagu atau notasi nada termasuk yang paling sering dijiplak. Demikian pula dengan novel, cerpen, dan film. Industri, biarpun sudah dilindungi hak paten, terhitung rentan dengan plagiarisme.

Mengatasi plagiarisme

Plagiarisme bisa disengaja atau tak disengaja. Akan tetapi, disengaja atau tidak, plagiarisme tetap menuai sanksi. Sanksi internal disesuaikan dengan konvensi institusi yang berlaku, mulai dari pencabutan gelar, pembatalan atribut/jabatan akademis tertentu, atau penundaan promosi. Sanksi sosial dijatuhkan bukan oleh institusi, melainkan publik eksternal. Nah, ini yang berat. Walaupun sanksi internal telah dijatuhkan, sulit sekali mengembalikan kredibilitas dan citra institusi yang telah tercoreng.

Bagi publik di luar institusi, plagiarisme di sebuah institusi memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap penegakkan etika akademis. Lebih jauh lagi, kasus plagiarisme biarpun cuma atau baru sekali terjadi, akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bergulir bagai bola salju: bagaimana dengan kualitas publikasi atau karya akademis lainnya? Bukan tidak mungkin, karya yang sudah ada selama ini juga dihasilkan dari plagiarisme. Kalau sudah begini, bisa dibayangkan betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memeriksa karya-karya lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Mengakhiri plagiarisme bukan hal mudah, tetapi bukan berarti tak bisa dilakukan. Pertama, perlu ada rambu-rambu yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai plagiarisme, dan mana yang bukan. Rambu-rambu ini harus disosialisasikan kepada setiap anggota lembaga—entah itu institusi akademis ataupun nonakademis. Kedua, perlu ada komitmen lembaga untuk penegakkan etika akademis yang di dalamnya mencakup pencegahan plagiarisme. Ini berarti, lembaga harus memiliki mekanisme pengontrolan yang jelas, termasuk pemberian sanksi kepada para plagiat. Sanksi ini perlu dikomunikasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, sekaligus upaya memperbaiki citra dan reputasi yang tercoreng. Ketiga, konsistensi gerakan atau aksi antiplagiarisme. Ini yang penting. Gerakan pembersihan plagiarisme tidak boleh dilakukan setengah-setengah, apalagi hangat-hangat tahi ayam. Penegakkan etika ilmiah atau etika akademis mesti menjadi norma lembaga yang tertanam pada setiap anggota institusi.

Berkaca dari laporan kasus plagiarisme selama ini, pihak yang pertama kali mengendus plagiarisme ternyata kebanyakan berasal dari luar institusi. Ini berarti, institusi sendiri punya kelemahan mendasar dalam mengontrol plagiarisme. Salah satu penyebabnya, ya karena antiplagiarisme belum terinternalisasi menjadi norma bersama di dalam institusi. (Santi Indra Astuti, dosen Fikom Unisba)***

Sumber:

Pikiran Rakyat, Senin, 17 Mei 2010

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=140803>